

Implementasi Kebijakan Berbasis *Blue Economy* dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara

Yundari Amelia Chandra¹, Ismah Rustam¹, Purnami Safitri¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
amelichapradipt@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses about how Indonesia implements the Blue Economy concept based marine policy in the collaboration between the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (KKP-RI) with the Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) to collaborate on the "Development of Effective and Inclusive Development project program Food Value Chains in ASEAN Member States" held during 2018-2019 in North Lombok Regency. The purpose of this study is to analyze the cooperation that takes place between MMAF-FAO using the concept of global governance and how the implementation of the concept of blue economy in Indonesia. In addition, this research also looks at how this collaboration affects the economic, environmental and social aspects of the community, especially project managers. This research uses the qualitative-descriptive method, with a case study approach. The type of data used in this research is derived from a combination of primary, secondary and tertiary sources. This research also uses Miles & Huberman's interactive model of data analysis. The research concludes that the cooperation between FAO and MMA in the UPI project as a whole has brought positive results with beneficial impacts for the people of North Lombok Regency.

Keywords: *Blue Economy, FAO, Fish Processing Unit, Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Indonesia mengimplementasikan kebijakan kelautan berbasis konsep *Blue Economy* pada kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) dengan *Food and Agriculture Organizations of the United Nations* (FAO) untuk berkolaborasi dalam proyek program "*Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States*" yang dilaksanakan selama tahun 2018-2019 di Kabupaten Lombok Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kerja sama yang terjadi antara KKP RI-FAO menggunakan konsep *global governance* dan bagaimana implementasi konsep *blue economy* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana kerja sama tersebut berpengaruh pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, khususnya para pengelola proyek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penggabungan antara data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama FAO dan KKP dalam proyek UPI secara keseluruhan membawa hasil positif dengan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Kata Kunci: *Blue Economy, FAO, Indonesia, Unit Pengolahan Ikan.*

PENDAHULUAN

Posisi geografis yang letaknya sangat strategis di garis khatulistiwa merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia. Laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi kekayaan maritim negeri. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah daratan seluas 1,9 juta km² yang tersebar pada 17.500 buah pulau-pulau yang disatukan oleh laut yang sangat luas sekitar 5.8 juta km² (Lestari, 2009, p. 4).

Posisi Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikan wilayah perairan laut Indonesia sebagai perairan berproduktivitas tinggi dengan daya dukung alam (*natural carrying capacity*) yang kuat. Selain itu, letak Indonesia di wilayah tropis dengan tingkat perubahan suhu lingkungan yang relatif rendah memungkinkan perkembangan berbagai hayati laut, sehingga Indonesia dipandang dunia sebagai daerah “*megabiodiversity*” (Dewan Kelautan Indonesia, 2012, p. 2). Berdasarkan Statistik Perikanan dan Akuakultur Tahun 2012 dari *Food and Agriculture Organization of United Nations* (FAO), Indonesia menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya (Limbong, 2015, p. 1).

Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 7.200 triliun per tahun atau enam kali lipat dari APBN 2011 yang memiliki besar Rp. 1.299 triliun dan satu setengah kali PDB 2015, yakni Rp. 5.000 triliun (Limbong, 2015, p. 1). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perikanan tercatat menampung 2.748.908 tenaga kerja pada tahun 2012, menduduki peringkat keempat dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perikanan, walaupun hanya menyumbang sekitar 2% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2013, namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan, yaitu sebesar 6,86%. Laju pertumbuhan sektor perikanan ini lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan, industri manufaktur, konstruksi, dan jasa (Rakhmindyarto & Sinulingga, n.d.). Kelautan sebagai bidang yang terdiri dari multisektor memerlukan sebuah kebijakan yang selaras dengan sektor ekonomi kelautan, mengingat adanya keterkaitan yang erat antar aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun di luar sektor.

Dalam rangka menyusun keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan sehingga berkelanjutan, maka penyusunan kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Berbasis Ekonomi Biru dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan (Dewan Kelautan Indonesia, 2012, p. 3). Pada forum Konferensi Rio+20 di Brazil akhir Juni 2012, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya tidak hanya mengajak dunia untuk bersama-sama melaksanakan ekonomi hijau dalam pembangunan nasionalnya, tetapi juga mengkampanyekan ekonomi biru (*blue economy*), dimana laut menjadi bagian integral untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Sehingga, model ekonomi biru perlu dijadikan bagian dari *grand design* pembangunan kelautan nasional (Dewan Kelautan Indonesia, 2012, p. 4). Presiden SBY dalam pidatonya menyatakan “*For Indonesia, Blue Economy is Our Next Frontier*”, yang intinya tidak hanya mengajak dunia untuk bersama-sama melaksanakan ekonomi hijau dalam

pembangunan nasionalnya, tetapi juga mengkampanyekan ekonomi biru (*blue economy*) (Badan Kerja Sama Antar Parlemen, 2018, p. 8).

Dengan demikian, secara eksplisit Presiden SBY telah mengarahkan konsep ekonomi biru sebagai *grand design* pembangunan kelautan nasional di masa depan (Dewan Kelautan Indonesia, 2012, p. 8). Ekonomi biru merupakan pengembangan dan koreksi praktis dari ekonomi hijau yang pernah diterapkan di Indonesia. Pertanian dan perkebunan menjadi komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri. Padahal, hasil dari pertanian dan perkebunan masih memiliki banyak kekurangan yang harus diantisipasi untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Produk hasil pertanian memiliki dampak buruk terhadap perubahan iklim yang lebih besar, apabila dibandingkan dengan produk akuakultur karena produk akuakultur mengeluarkan lebih sedikit emisi nitrogen dan fosfor global per satuan berat (Conservation International, 2011).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian melanjutkan cetusan konsep yang selaras dengan visi misinya tersebut. Presiden Jokowi bersama kabinet kerjanya menjadikan kemaritiman sebagai salah satu prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah menginginkan kemandirian Indonesia sebagai negara maritim yang maju, kuat, dan berlandaskan pada kepentingan nasional. Hal tersebut didukung oleh lahirnya konsep Poros Maritim Dunia (PMD) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di sebuah pidato kenegaraan yang bertempat di Naypyidaw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014 dalam forum *East Asian Summit* ke-9 dan sejak saat itulah menjadi visi nasional bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki agenda pembangunan global atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia harus melaksanakan agenda pembangunan tersebut. Adapun agenda dari SDGs adalah untuk menuntaskan berbagai permasalahan di dunia, seperti kelaparan, kemiskinan, malnutrisi, masalah lingkungan, dan sebagainya. Sebagai negara yang memiliki keterbukaan dalam berbagai sektor, masalah yang terjadi di Indonesia ditakutkan akan membawa efek domino ke negara lainnya. Indonesia juga dinilai belum mampu secara mandiri untuk menuntaskan berbagai permasalahan di negaranya. Oleh karena itu, untuk menanggulangnya diperlukan suatu *global governance* yang dapat mengkoordinasikan negara-negara dan menyelesaikan masalah tersebut, baik dalam skop lokal, nasional, maupun internasional.

Seiring berjalannya waktu, negara tidak lagi memegang peranan sentral dalam perpolitikan internasional. Akan tetapi, aktor-aktor non-negara mulai mengambil alih dan bermain dalam politik berskala internasional dan menunjukkan eksistensinya. Salah satu bentuknya adalah organisasi antarpemerintah internasional yaitu FAO (*Food and Agriculture Organization*) yang berkonsentrasi dalam perjuangan internasional untuk memerangi kelaparan. Tujuan FAO adalah untuk mencapai ketahanan pangan untuk semua dan memastikan bahwa orang memiliki akses teratur ke makanan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat (Food and Agriculture Organization (FAO), n.d.).

Masalah-masalah tersebut masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan predikat termasuk dalam

sepuluh provinsi termiskin di Indonesia dan memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Akan tetapi, provinsi NTB memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar, dimana data-data dari Balai Bio Industri Laut Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI menyebutkan bahwa potensi laut di Lombok begitu kaya dan mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi yang sedemikian besar tidak mampu menyelamatkan Provinsi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Utara dari berbagai permasalahan pelik tersebut.

Kabupaten Lombok Utara yang memiliki wilayah pesisir yang identik dengan berbagai masalah sosial. Selain itu, distribusi keberadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) tidak merata karena masih hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 menunjukkan persebaran jumlah unit pengolahan ikan tertinggi di wilayah Jawa-Bali (54,61%), kemudian Sulawesi (19,59%), Sumatera (14,29%), Kalimantan (7,60%), Maluku dan Papua masing-masing (1,84%), dan terendah NTB-NTT (0,23%) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010). Penanggulangan permasalahan tersebut diatasi dengan pengimplementasian suatu proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama *Food and Agriculture Organization (FAO)* dengan nama *Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States*. Tujuan dari dibangunnya proyek tersebut adalah untuk meningkatkan rantai nilai pangan dan mengatasi masalah-masalah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, berdasarkan sebuah buku yang berjudul *Konsep Blue Economy: Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia* yang ditulis oleh Dr. H. Ali Musa Pasaribu, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis dan merupakan suatu potensi besar bagi Indonesia. Berkaitan dengan letaknya yang strategis, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah, dimana jika dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia yang memiliki sekitar 17.000 pulau ini akhirnya memiliki status sebagai negara kepulauan berkat adanya *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* (Pasaribu, 2017).

Dengan potensi kekayaan laut dan alam yang dimiliki oleh Indonesia, maka Indonesia harus membentuk kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan berkelanjutan. Hal ini tentunya dengan menyadari fakta bahwa pengelolaan sumber daya laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil di Indonesia masih belum maksimal, tawaran konsep ekonomi biru ini dapat menjadi pilihan untuk pertumbuhan baru Indonesia. Selama ini kebijakan pemerintah dalam mendukung percepatan ekonomi di pulau-pulau kecil Indonesia masih dominan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Dalam Negeri. Tidak menutup kemungkinan, bekerja sama dengan organisasi internasional atau negara lainpun dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan wilayah pesisir Indonesia (Pasaribu, 2017, p. 30).

Buku ini secara spesifik menjelaskan mengenai bagaimana implementasi kebijakan ekonomi biru mulai diterapkan di Indonesia pada beberapa wilayah dengan mempertimbangkan kendala serta peluang yang terdapat pada lokasi tersebut (Pasaribu, 2017). Selain itu, dijelaskan juga beberapa kegiatan subsektor industri maritim yang memperhitungkan hukum laut perairan Indonesia, tetapi lebih dominan

disinggung dari perspektif publik daripada konsep ekonomi biru yang dicetuskan oleh Prof. Gunter Pauli. Padahal, konsep ekonomi biru ini relevan dengan visi Indonesia. Berbeda dengan inovasi bisnis berbasis maritim ini yang menentang stigma kapitalis yang berpikiran bahwa proses bisnis tidak harus mengorbankan lingkungan demi profit. Pembangunan yang ada haruslah berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Pauli, 2010, p. 21).

Kedua, berjudul “*Blue and Green Economy (BGE) Policy and Their Impact to Indonesian Community Welfare*” yang ditulis oleh Siti Nurhayati. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi ekonomi biru dan hijau pada kebijakan di Indonesia yang memberi efek ganda pada aktivitas ekonomi. Kebijakan BGE yang dilaksanakan oleh Indonesia dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tumbuh kembangnya berbagai usaha yang bisa dijalankan masyarakat yang mengandalkan kegiatannya pada sumber daya perikanan dan kelautan (Nurhayati, 2013).

Kondisi seperti inilah yang diimpikan oleh para penyusun rencana pembangunan di Indonesia, yang memiliki cita-cita mulia untuk mensejahterakan masyarakat. Penerapan konsep BGE secara berdampingan dalam perencanaan pembangunan Indonesia membawa dampak positif bagi kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan karena keduanya dilakukan secara berdampingan. Hal ini membawa perubahan perilaku pada masyarakat untuk lebih cinta lingkungan, lebih cinta sumber daya hayati, dan berusaha untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan cita-cita luhur Indonesia (Nurhayati, 2013).

Ketiga, penelitian Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi yang berjudul “Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*” yang menjelaskan mengenai beberapa program berbasis ekonomi biru yang telah diimplementasikan di beberapa provinsi Indonesia, seperti Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumbawa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi ekonomi baru di lapangan selama periode Maret hingga Oktober tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Strength Weakness Opportunity dan Threat (SWOT)* serta pendekatan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan menggunakan beberapa kuesioner yang terstruktur (Radiarta et al., 2015).

Penelitian ini mengidentifikasi 3 faktor keberhasilan pengembangan perikanan budidaya berbasis ekonomi biru. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pelestarian lingkungan, penerapan konsep ekonomi biru pada aktivitas budidaya, dan ketersediaan teknologi budidaya. Penelitian ini secara keseluruhan telah menganalisis dampak ekonomi biru secara rinci dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga mampu menginterpretasikan fenomena sosial secara rasional. Namun, pembahasan dalam penelitian tersebut terlalu meluas dan kurang spesifik karena mengambil wilayah penelitian implementasi ekonomi biru yang tersebar di berbagai tempat (Radiarta et al., 2015).

Kesimpulan dalam penelitian tersebut, yaitu dalam penerapan kebijakan ekonomi biru harusnya dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan kelautan dan perikanan yang integratif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi ekonomi biru yang menyeluruh ke masyarakat setempat, serta penerapan budidaya perikanan yang

berprinsip ekonomi biru. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keberagaman dan meningkatkan jumlah produk, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup (Radiarta et al., 2015, p. 47).

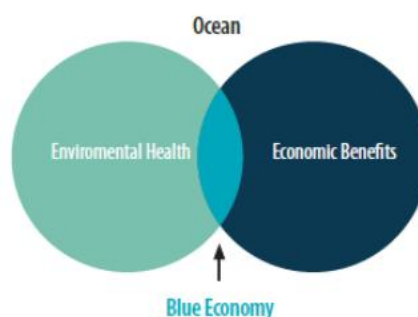
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berupa penelitian riset yang cenderung deskriptif dan analisis menggunakan landasan teori. Salah satu pendekatan kualitatif adalah studi kasus, yang berfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam atas suatu kasus dengan sistem yang dibatasi oleh konteks tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penggabungan antara data primer, sekunder dan tersier. Penulis melakukan wawancara secara langsung pada pihak yang terlibat sebagai data primer. Data tersier penulis dapatkan melalui berbagai *website* atau sumber daring lainnya di internet yang memiliki muatan kajian terkait pokok penelitian, baik portal nasional maupun internasional. Penelitian ini juga menggunakan model interaktif Miles & Huberman: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep *Blue Economy* pertama kali dicetuskan oleh Prof. Gunter Pauli, yang merupakan pendiri dan aktivis *Zero Emission Research Initiative* (ZERI) dalam bukunya yang berjudul “*The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*”. Buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh *United Nation Environmental Programme* (UNEP). Buku tersebut berisikan gambaran mengenai potensi dan manfaat teorinya bagi perlindungan lingkungan hidup komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, hasil daur ulang atau terbarukan, bisa dilihat pada Gambar 1 (Pauli, 2010).

Gambar 1. Konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*)



Sumber: (Patil et al., 2016)

Menurut Gunter Pauli, *Blue Economy* berarti “*blue ocean – blue sky*”, yang dapat dipahami bahwa pendekatan model ini akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun laut dan langit tetap biru (Rani & Cahyasari, 2015, p. 1918). Definisi *Blue Economy* juga disampaikan oleh Prof. Dr. Tridoyo

Kusumantato pada seminar 'Blue Economy' di Bogor pada tahun 2012, yaitu *blue economy* dapat dinyatakan sebagai "aktivitas ekonomi di pesisir dan laut yang didukung aktivitas ekonomi daratan yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat serta dapat berlangsung secara berkelanjutan". Di samping itu, WEN Quan (*National Marine Environmental Monitoring Center Dalian, China*) lebih menekankan ekonomi biru adalah kekuatan ekonomi laut (Rani & Cahyasari, 2015). Pauli mengatakan bahwa:

"Blue Economy" is a collection of innovations contributing towards the creation of a global consciousness rooted in the search for practical solutions based on sustainable natural systems" (Pauli, 2010).

Adapun beberapa prinsip yang dianut dalam konsep ekonomi biru oleh Pauli adalah: *Pertama*, nir-limbah (*zero waste*) dan menekankan sistem siklikal dalam proses produksi, sehingga tercipta produk bersih. *Kedua*, inklusi sosial (*social inclusiveness*), yang berarti pemerataan sosial dan kesempatan kerja yang banyak untuk orang miskin. *Ketiga*, inovasi dan adaptasi, yang memperhatikan prinsip hukum fisika dan sifat alam yang adaptif. *Keempat*, efek ekonomi pengganda, yang berarti aktivitas ekonomi yang dilakukan akan memiliki dampak yang luas dan tidak rentan terhadap gejolak harga pasar (Satria, 2015, p. 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Indonesia untuk menerapkan konsep *blue economy* dilandasi oleh kenyataan kondisi geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada), sehingga perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya laut karena pelestarian sumber daya laut ini akan berdampak pada cadangan sumber pangan masyarakat yang bisa diandalkan (Nurhayati, 2013, p. 38). Hal itu disebabkan oleh urgensi kemaritiman yang menjadi tumpuan banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian pada sektor tersebut, seperti nelayan, pengolah ikan, pengelola wisata bahari, dan berbagai usaha turunan lainnya. Selanjutnya, peningkatan intensitas kegiatan ekonomi di daratan akan menyebabkan kerusakan sumberdaya alam, sedangkan kerusakan alam di daratan akan merusak perairan: sungai, pesisir dan laut, berupa degradasi lingkungan karena pencemaran dan sedimentasi (Mira et al., 2014).

Sementara itu intensitas kegiatan di perairan sendiri juga terus mengancam kerusakan lingkungan perairan, yang dikemukakan oleh Sumoto (2013) dalam Mira, Firdaus dan Reswati (2014, p. 1). Alasan lainnya, sejumlah negara Asia menghadapi berbagai tantangan laut, seperti kebersihan perairan laut, ketahanan pangan dan gizi, kemiskinan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Alasan tersebut yang menyebabkan diperlukannya komitmen bersama yang tegas untuk mengatasi masalah ini.

Keseriusan Indonesia dalam implementasi *blue economy* ditunjukkan pada partisipasi Indonesia dalam berbagai acara bertema konsep tersebut, salah satunya yaitu, *Discussion Forum on Blue Economy* yang diselenggarakan di Jakarta, pada 12 Desember 2012. Acara tersebut diikuti oleh berbagai lapisan, termasuk masyarakat, akademisi, dan LSM. Dalam acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo menyatakan bahwa KKP menjadikan paradigma *blue economy* sebagai paham dalam pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan. Konsep ini dinilai mampu mengembangkan ekonomi masyarakat secara komprehensif yang bermuara pada tercapainya pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Antara News, 2012). Acara lainnya yaitu *Our Ocean Conference V* yang diadakan di Bali.

Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) telah bersepakat untuk menjadikan *blue economy* sebagai instrumen pembangunan negara-negara anggotanya, sebagai salah satu negara anggota, Indonesia harus memparalelkan konsensus ini untuk diterapkan di dalam negeri. Hal ini dilakukan Indonesia dengan member mandat pada KKP RI. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia melalui Dewan Kelautan Nasional yang bernaung pada KKP RI telah merumuskan sebuah konsep berbentuk buku digital yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru” yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat secara adil di segenap wilayah NKRI. Selain itu, prinsip-prinsip dalam konsep *blue economy* juga bersinergi dengan *grand strategi* pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yakni: *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan) yang ditunjukkan pada Gambar 2 (Dewan Kelautan Indonesia, 2012, p. 2).

Gambar 2. Pilar Strategi Pembangunan Nasional



Sumber: (Dewan Kelautan Indonesia, 2012)

Dalam mengimplementasikan *blue economy* dalam proyek ini bersama FAO, KKP RI dan pihak tersebut memiliki MoU tentang Kolaborasi Kelautan dan Perikanan yang meliputi beberapa poin utama diantaranya, yaitu:

1. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
2. Peningkatan kapasitas termasuk pengembangan pendidikan, pelatihan bagi masyarakat nelayan;
3. Riset dan pertukaran para ahli, ilmuwan di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*) (ANZDOC, 2013).

FAO juga memiliki model untuk pengembangan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan yang dinamakan *Blue Growth Initiative* (BGI) yang serupa dengan konsep *blue economy*. Indonesia sebagai negara anggota FAO juga harus mensinergikan model tersebut di negaranya. Tujuan BGI adalah memaksimalkan

manfaat ekonomi dan sosial sambil meminimalkan degradasi lingkungan dari sektor-sektor ini. Sasaran-sasaran ini sangat selaras dengan agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan Pertumbuhan Biru tetap fleksibel untuk berbagai kondisi, dari perikanan darat tropis hingga negara pesisir Arktik. Kerangka kerja BGI untuk transisi ke pertumbuhan biru terdiri dari tiga fase: 1) menciptakan kondisi yang memungkinkan; 2) mengimplementasikan intervensi yang ditargetkan; dan 3) pengarusutamaan (FAO of the UN, 2017, p. 1).

PELAKSANAAN PROYEK UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)

Dalam rangka mewujudkan visi keberlanjutan dan kesejahteraan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) bersama Lembaga pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, 713, 714, dan 573, telah menyetujui rencana untuk meningkatkan pengelolaan perikanan secara terintegrasi. Hal ini dilakukan melalui implementasi program “*Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of The Indonesian Seas (ISLME)*”, dengan dukungan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Food and Agriculture Organization/FAO*) (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2019). Area yang menjadi pokok bahasan dalam kegiatan ini adalah lima area prioritas LME Indonesia yang terletak di pantai utara Jawa, Kalimantan Timur, Flores Timur, Lombok dan daerah perbatasan Batugede-Atapupu (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2019).

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Innes Rachmania mengatakan, proyek ini merupakan perbaikan dari rantai nilai pangan dan produktivitas ikan pindang dengan integrasi pasar baru yang dimulai sejak September 2016. Proyek ini merupakan kolaborasi antara KKP dan FAO, yaitu “*Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States (GCP/RASS/296/JPN)*” yang didanai oleh Jepang (Hartomo, 2019). Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk menilai rantai nilai spesifik dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi untuk menanggulangi keterbatasan. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk membuat kontribusi yang signifikan pada sektor keamanan pangan dan mata pencaharian pada penggarap atau petani dengan mengintegrasikannya pada rantai nilai pangan.

Menurut Ibu Hasna, selaku (Penyuluh DKP Provinsi NTB), Kabupaten Lombok Utara dipilih sebagai lokasi pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI) setelah KKP merekomendasikan beberapa komoditas, salah satunya adalah ikan pindang dengan beberapa pilihan lokasi. Adapun lokasi tersebut terletak di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Pulau Lombok. Setelah dilakukan diskusi lanjutan, dipilihlah komoditas ikan pindang yang ada di Lombok Utara dengan harapan proyek ini bisa mendukung program selanjutnya terkait *blue economy* yang pernah diimplementasikan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan nama proyek TCP/INS/3501. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari DKP Provinsi NTB disertai beberapa pertimbangan, seperti kelompok pengolah yang cukup kooperatif, dan potensi pengembangan ikan pindang yang cukup besar dan karena telah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut, yaitu paling bersih dibanding UPI lain di lokasi lain di Pulau Lombok (Hasna, wawancara, 2020). Selain itu, Kabupaten Lombok Utara memiliki

ketersediaan sumber daya perikanan yang cukup dan tepat sasaran karena akan berimplikasi pada perekonomian masyarakat sekitar terutama wilayah pesisir.

Mengingat sepanjang wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan pesisir pantai, sub sektor perikanan sangat potensial untuk dikembangkan terutama perikanan tangkap. Jenis ikan tangkap laut yang umum ditangkap adalah ikan layang dan ikan selar, produksi ikan tembang dan selar pada tahun 2014 masing-masing 1.490,7 ton dan 903,9 ton (Dinas Komunikasi dan Informatika KLU, 2016, p. 228). Luas wilayah perairan yang hampir sebanding dengan luas wilayah daratan di Lombok Utara menyebabkan terjadinya permasalahan pada masyarakat pesisir. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Masalah kompleks yang kerap dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya dan teknologi, serta kurangnya peran aktif dari pihak luar. Sehubungan dengan itu, masyarakat pesisir dicirikan dengan jenis usaha seperti nelayan, pedagang, dan pembudidaya ikan. Permasalahan lain yang juga dialami sebagian masyarakat pesisir di Indonesia adalah kelaparan, gizi buruk, kekurangan energi kronis, dan lainnya. Hal tersebut juga berkontribusi dalam alasan didirikannya proyek UPI di Kabupaten Lombok Utara.

Umumnya, masyarakat mengolah hasil perikanan tangkap menjadi ikan pindang yang pembuatannya mengandalkan metode konvensional, yaitu perebusan dan penggaraman. Ikan pindang merupakan olahan tradisional yang menjadi komoditas utama di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Lombok Utara (Suranava, 2016, p. 7). Studi mengenai rantai nilai ikan pindang ini mulai dilakukan pada tahun 2017 dan laporannya divalidasi pada *Workshop* Pemangku Kebijakan Nasional pada 1 Februari 2018 di Pulau Lombok. Kontrak proyek ini kemudian berakhir secara resmi pada tahun 2019. Adapun beberapa hal utama yang teridentifikasi pada studi tersebut yang menjadi pertimbangan dibangunnya proyek tersebut adalah:

1. Akses pemasaran yang terbatas hanya pada skala lokal;
2. Kurangnya variasi produk;
3. Tidak adanya unit proses tersertifikasi yang memenuhi standar kualitas nasional;
4. Terbatasnya kemampuan manajemen bisnis, termasuk iliterasi keuangan antara pemilik dan pekerja dalam unit proses;
5. Sanitasi dan pengelolaan limbah sistem produksi yang rendah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adapun rekomendasi intervensi yang diajukan, yaitu:

1. Pengembangan pasar ikan pindang melalui kolaborasi dengan industri pariwisata;
2. Pengembangan produk dengan cara perbaikan pengemasan menggunakan alat vakum dengan mempertahankan cita rasa lokal. Sedangkan untuk hotel dan restoran dikemas secara khusus;
3. Membangun unit proses di Lombok Utara yang memenuhi standar nasional dengan berkolaborasi bersama produsen yang kooperatif dan dikelola langsung oleh mereka;
4. Pelatihan mengenai sanitasi dan pengelolaan limbah;
5. Pelatihan mengenai manajemen bisnis.

UPI tersebut yang terletak di Desa Lekok, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. UPI higienis ini dibangun dalam luasan wilayah 65 m² dengan kapasitas produksi sekitar 500 kg/hari. Pembangunannya menelan biaya senilai Rp332.752.990.

Selain itu, bantuan peralatan pengolahan seperti *boiling table, cooker hood, washing table, working table, wash basin, storage rack, grease trap, chest freezer, low temperature freezer, gas stand burner, vaccum packing machine*, dan timbangan digital juga diberikan. Peralatan yang dihibahkan ini bernilai Rp84.459.250. UPI ini juga dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berukuran 7,5 m² yang terdiri dari 4 (empat) *chamber* penampungan dengan sekitar 50 orang pengolah yang telah dilatih ilmu sanitasi, pengelolaan limbah, dan kewirausahaan (Hartomo, 2019).

Hasil yang diperoleh dari proyek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterampilan masyarakat melalui pelatihan pengembangan produk yang bernilai tinggi;
2. Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan organisasi;
3. Meningkatnya kemampuan dalam pemasaran atau penjualan melalui praktek langsung di lapangan maupun pameran atau bazaar;
4. Berkembangnya jaringan dengan organisasi sosial, instansi pemerintah dan pengusaha (Field Facilitator of FAO Indonesia, 2019, p. 10).

Sejak diresmikan dan dikelola oleh masyarakat sekitar, UPI tersebut tidak dilepas begitu saja, tetapi terdapat usaha tindak lanjut dan evaluasi proyek yang dilakukan dengan cara-cara berikut ini: (Suhaim, 2019, p. 12). *Pertama*, kunjungan atau *monitoring* berkala petugas penyuluh, dan petugas lain yang berkompeten dan terlibat langsung pada proyek ini secara berkala. *Kedua*, melengkapi perizinan yang diperlukan seperti SKP, MD agar produk dapat dijual di *supermarket, catering, restoran* dan hotel. *Ketiga*, mengembangkan system pemasaran online melalui media sosial, *website* dan pemasaran langsung (*door to door, pameran, dan bazaar*). *Keempat*, menggunakan berbagai metode promosi. *Kelima*, bekerja bersama pelaku usaha yang telah memiliki jaringan pemasaran, mitra usaha, *middle man, dan reseller* (Suhaim, 2019).

ANALISIS KEBIJAKAN BERBASIS *BLUE ECONOMY* SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN GLOBAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA TATARAN LOKAL

Bagan 1. Gambaran Umum Operasionalisasi Analisis Konsep dengan Studi Kasus



Sumber: Diolah oleh Penulis

Bagan 1 menggambarkan operasionalisasi konsep dengan studi kasus yang dilakukan penulis. *Global governance* memiliki berbagai unsur yang menurut Karns, yaitu, *international law, norms (soft law), intergovernmental organizations, nongovernmental organizations, international regimes, ad hoc arrangements, global conferences*, dan *private governance*. Akan tetapi pada tulisan ini, penulis hanya akan membahas dua unsure yaitu rezim internasional dan organisasi antar pemerintah internasional, kemudian dilengkapi dengan *common issue* atau masalah bersama. *Pertama*, rezim internasional yang didefinisikan oleh Krasner sebagai prinsip-prinsip, norma norma, aturan-aturan dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan dimana harapan-harapan aktornya terpusat pada suatu bidang persoalan yang diberikan.

Biasanya rezim internasional dirumuskan bersama-sama oleh aktor-aktor internasional untuk membahas isu dan masalah tertentu kemudian mencari solusinya karena dianggap sebagai ancaman bersama oleh para pembuat rezim tersebut. Rezim internasional mengandung norma, prinsip, atau aturan yang disahkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Umumnya, rezim internasional hanya berfokus pada isu atau masalah pada satu bidang kehidupan saja, misalnya lingkungan atau persenjataan.

Sejak menyerukan ekonomi biru pada KTT Rio20+ di Brazil, Indonesia semakin serius dalam mengimplementasikan model tersebut. Keseriusan tersebut tercermin pada kegigihan Indonesia dalam mengikuti dan menyelenggarakan berbagai acara yang berkaitan dengan *blue economy*. Komitmen untuk menerapkan ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan dipertegas oleh Indonesia dengan menjadi salah satu negara peserta sekaligus tuan rumah *Our Ocean Conference (OOC) 2018* yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 29-30 Oktober 2018. Konsep tersebut diadopsi Indonesia untuk pengembangan sektor perikanan budidaya yang saat ini semakin diminati masyarakat. Beberapa rentetan kegiatan *blue economy* yang pernah diikuti oleh Indonesia dapat dilihat pada tabel di bahasan mengenai Indonesia dalam kesepakatan *blue economy*.

Selain itu, Indonesia juga melakukan penyesuaian pada kebijakan-kebijakan pembangunan nasionalnya dengan model paradigma tersebut. Berdasarkan penjelasan definisi penstudi rezim, *blue economy* merupakan rezim internasional pembangunan yang muncul untuk membantu mengatasi permasalahan pembangunan yang dialami oleh berbagai negara dunia, terutama negara maritim. Hal tersebut mengandung prinsip, aturan dan prosedur yang mengatur mengenai pembangunan yang berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang efektif.

Kedua, menurut Joseph Nye, negara bukan lagi menjadi aktor utama dalam politik internasional, melainkan hanya sebagai bagian dari interaksi politik, militer, ekonomi dan sebagainya. Salah satu contoh aktor non-negara adalah organisasi internasional, yang berperan untuk melibatkan negara-negara dalam melakukan tindakan, mengkoordinasikan upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang berbeda, menyediakan kemampuan diplomatis untuk menjamin kesepakatan kesepakatan, dan memastikan berjalannya program-program. FAO sebagai organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB, dalam konteks kerja sama ini, merupakan pihak eksternal yang memiliki peran untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan cakupan pada skala lokal. Kerja sama yang dilakukan pada program-program pembangunan

sesuai dengan norma, kerangka kerja, dan instrument internasional. FAO memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan dengan pemerintah lokal dan pusat terkait implementasi pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk konservasi fungsi ekosistem maritim serta mengoptimalkan keuntungan sosial dan ekonomi dari wilayah Indonesia tertentu (Smulders, 2016).

Upaya yang dilakukan FAO dalam membantu suatu pemerintah atau lembaga dalam mewujudkan capaiannya adalah dengan cara membuat suatu dokumen pedoman yang menjadi referensi atau panduan. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya global dan nasional dalam pemberantasan kelaparan dan kemiskinan, berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan PBB. Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*, *FAO Compliance 1993*, dan lain sebagainya (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2017, p. 16).

Ketiga, kerja sama yang dilakukan dengan aktor-aktor internasional tentu memiliki permasalahan bersama yang perlu ditanggulangi. Permasalahan tersebut diistilahkan *common affairs* atau urusan bersama. Terlebih di era globalisasi, muncul berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kelembagaan negara. Dalam konsep tradisional, beberapa masalah tersebut diantaranya ialah pemanasan global, bencana alam dan kelaparan, terorisme, penyakit pandemi, rasisme, migrasi, pelanggaran HAM, penyakit menular dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan suatu jawaban atas *sense of crisis* tentang bagaimana caranya mengupayakan keteraturan dunia dengan cara mengkoordinasikan dan menjalin kooperasi antarnegara serta aktor non-negara.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keterbukaan pada bidang ekonomi dan politik memiliki isu domestik yang dapat melebar menjadi isu regional atau kawasan. Isu tersebut secara langsung atau tidak bersinggungan dengan isu-isu regional dan global. Indonesia dengan kapasitas yang dimiliki saat ini dipandang belum cukup mampu untuk menangani isu-isu ini tanpa adanya sinergi dengan institusi atau kelembagaan non-negara yang juga berkepentingan dalam isu yang sama. Salah satu bentuk koordinasi antara negara dan aktor non-negara adalah adanya upaya mengatasi permasalahan pelik dunia seperti kelaparan dan ketahanan pangan, melalui organisasi antarpemerintah internasional, yaitu FAO yang berkonstrasi dalam perjuangan internasional untuk memerangi kelaparan dan keamanan pangan. Tujuan FAO sendiri adalah untuk mencapai ketahanan pangan untuk semua dan memastikan bahwa orang memiliki akses teratur ke makanan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.

Salah satu implementasinya adalah dengan pengadaan proyek bernama "*Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States*". Pihak FAO menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari proyek tersebut adalah untuk berkontribusi pada ketahanan pangan dan mata pencaharian pengolah ikan pindang berskala kecil. Langkah untuk mencapai agenda globalnya dalam bidang pemenuhan kebutuhan pangan, diinisiasi oleh FAO dengan beberapa program dan gerakan yang mempromosikan sektor perikanan dan kelautan. Promosi tersebut

dilakukan kepada agen lainnya, yaitu Jepang, serta memperhatikan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor privat dalam penerapan program pembangunan berbasis ekonomi biru.

ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP *BLUE ECONOMY* DI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) KABUPATEN LOMBOK UTARA

Prinsip-prinsip dalam *blue economy* sangat relevan untuk diterapkan atau disinergikan dengan kebijakan Indonesia karena konsep ini dapat memberi solusi pada permasalahan seperti pengangguran, masalah pangan dan kemiskinan. Selain itu, *blue economy* adalah penggabungan konsep dari pembangunan dan kelestarian lingkungan. Konsep *blue economy* mampu menjadi jembatan antara nilai ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pembangunan kelautan nasional juga diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif serta harus sinergi dengan *grand strategy* pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, yakni: *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan). Paradigma tersebut melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). KKP juga mengatakan bahwa *blue economy* merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan, yaitu akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas yang Memberi Nilai Tambah dan Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Di Lombok Utara, selain diberikan pelatihan mengenai bagaimana cara memproduksi pindang higienis, pelatihan pemasaran dan kewirausahaan, para pengelola usaha UPI, penyuluh dan staf pemerintahan juga dibekali dengan pengetahuan bagaimana cara mengelola limbah ikan tersebut. Ilmu mengenai sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi sangat penting untuk ekonomi biru. Pada bangunan UPI tersebut telah dilengkapi saluran sanitasi dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola limbah. Hal ini sesuai dengan aspek *zero waste* yang sejalan dengan program prioritas pemerintah provinsi NTB dengan target 70% pengelolaan dan 30% pengurangan sampah di tahun 2023 nanti yang bisa dilihat pada Gambar 3. Aspek tersebut belum terpenuhi secara maksimal karena hanya mengolah air sisa rebusan ikan tersebut menjadi petis. Bagian isi perut ikan yang terbuang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Akan tetapi, hal tersebut jauh lebih baik karena sebelumnya masyarakat membuang air sisa rebusan sembarangan seperti di pinggir pantai dan menyebabkan bau yang tidak sedap di sekitar area pemukiman dan dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri.

Gambar 3. Pengelolaan Limbah



Sumber: (Suhaim, 2019)

Pro job strategy mencakup kapasitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan atau program sektor riil yang didukung dengan perbaikan iklim investasi dan kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerja sama dengan swasta, dan sebagainya. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada tenaga kerja, sehingga meningkatkan kemampuan dan keahlian dari tenaga kerja tersebut. Hal ini telah terimplementasi dalam proyek kerja sama FAO dan Pemerintah Indonesia. Masyarakat Desa Lekok sebelumnya hanya mengandalkan sektor tradisional dalam mengelola ikan pindang dan hanya mengandalkan tangkapan nelayan sekitar. Anggota UPI tersebut berjumlah 17 orang yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengandalkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi setelah adanya berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh FAO dan KKP, kini masyarakat mampu melakukan produksi dengan standar Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, Izin Edar dan Pendaftaran Pangan Olahan (MD), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Peningkatan Kapasitas Pengelola UPI pada Rekaman Harian



Sumber: (Suhaim, 2019)

Implementasi program selanjutnya berkaitan dengan *pro-growth* yang dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan ekspor dan investasi. Dalam implementasinya, program *pro-growth strategy* mencakup

strategi pemberdayaan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi usaha mikro dengan fokus pada kesempatan berusaha dan stabilitas pendapatan, usaha kecil yang berfokus pada kualitas produk dan jasa, efisiensi usaha dan daya saing dan usaha menengah dengan fokus pada kontribusi pertumbuhan dan daya saing seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. *Pro growth* dapat disandingkan dengan program *pro poor*. *Pro poor* dapat dilakukan melalui pendekatan seperti merevitalisasi berbagai sektor seperti, kehutanan, pertanian, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengentaskan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga klaster, yaitu Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Program-program Pemberdayaan Masyarakat serta Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Produsen Ikan Pindang per Bulan

No.	Produsen Ikan Pindang di Lombok Utara	Penhasilan per hari (Rp)					Hari kerja/bulan				Penghasilan Rp/bulan (survei akhir)	Penghasilan Rp/bulan (survei dasar)	% tasi peningkatan
		tradisional	hygienis / presto	abon	ikan asin	Total	tradisional	hygienis / presto	fish meat floss	salty fish			
1.	A	434.000	30.000	160.000	175.000	799.000	27	4	1	5	12.873.000	7.500.000	72
2.	B	203.000	30.000	160.000	125.000	518.000	29	4	1	5	6.792.000	6.250.000	9
3.	C	404.000	0	0	265.000	669.000	29	0	0	5	13.041.000	12.833.000	2
4.	D	556.000	0	0	0	556.000	23	0	0	0	12.788.000	12.500.000	2
Persentase rata-rata peningkatan											11.373.500	9.770.750	16

Sumber: (Suhaim, 2019, p. 12)

Kerja sama yang dilakukan oleh KKP dan FAO secara keseluruhan telah membawa dampak positif bagi masyarakat pengelola UPI tersebut, meskipun banyak kendala dan beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Terlebih dalam integrasinya dalam tataran pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Adapun terjadinya *misleading* dalam penerapan prinsip *blue economy* terutama pada prinsip inklusifitas dan *zero waste*. Aspek *zero waste* yang penulis temukan di lapangan berbeda dengan yang dituturkan oleh *stakeholder*. Hal tersebut terjadi karena modal sosial pada masyarakat NTB berbeda dengan pelatihan yang diberikan oleh pihak DKP dalam mengelola limbah ikan pindang untuk dijadikan petis.

Pada prinsip inklusifitas, masyarakat yang diuntungkan hanya yang tergabung dalam kelompok UPI tersebut, sedangkan yang lainnya tidak, padahal para anggota kelompok UPI tersebut sebagian besar telah memiliki kemampuan untuk mengolah produk perikanan. Agar prinsip inklusifitas dapat tercapai, seharusnya *stakeholder* harus menysasar pada masyarakat yang ditargetkan pada prinsip tersebut untuk mewujudkan inklusifitas sosial yang menyeluruh. Konsep *blue economy* yang berakar dari aliran *deep ecology* saat diimplementasikan pada tataran kebijakan berubah menjadi *shallow ecology* karena mengalami benturan politis. Pada prinsipnya berbunyi

zero waste dan cara kerja alam adalah yang utama, tetapi ketika diterapkan pada masyarakat orientasi utamanya hanya nilai ekonomi, bukan pada upaya pelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki potensi sumber daya kelautan yang luar biasa menerapkan kebijakan ekonomi biru dalam pengembangan sektor maritim. Kebijakan nasional berbasis ekonomi biru baru mulai dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden SBY dan merupakan suatu hal yang baru bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia lebih berfokus pada pembangunan sektor daratan. Kebijakan kelautan berbasis ekonomi biru kembali dipertegas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang selaras dengan visinya dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesia telah melakukan penyelarasan konsep *blue economy* dengan beberapa kebijakan terkait, khususnya pada RPJMN. Penyelarasan tersebut dilakukan karena berkaitan dengan komitmen global yaitu pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Hal yang perlu dilakukan Indonesia untuk menyukseskan kebijakan ekonomi biru adalah bekerja sama dengan pihak eksternal agar menghasilkan output yang positif dan integratif.

Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah dengan badan khusus PBB yang menangani urusan pangan dunia yaitu FAO. Perwujudan kerja sama tersebut didukung oleh agenda global FAO sebagai organisasi internasional pangan dunia yang menangani berbagai isu terkait. Salah satu isu yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini adalah masalah kelaparan, kemiskinan dan malnutrisi di berbagai belahan dunia, termasuk yang terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerja sama antara FAO dan pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh KKP RI dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB. Adanya proyek kerja sama ini didukung oleh potensi kelautan NTB yang sangat besar tetapi belum mampu dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Selain itu, angka kemiskinan yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional di Provinsi NTB menjadi perhitungan.

Proyek yang merupakan kolaborasi antara KKP dan FAO ini bernama "*Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States (GCP/RASS/296/JPN)*". Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk menilai rantai nilai spesifik dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi untuk menanggulangi keterbatasan. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk membuat kontribusi yang signifikan pada sektor keamanan pangan dan mata pencaharian pada penggarap atau petani dengan mengintegrasikannya pada rantai nilai pangan. Implementasi proyek tersebut dilakukan dengan cara membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Lekok, Kabupaten Lombok Utara yang merupakan desa dengan dominasi masyarakat pesisir dengan berbagai permasalahan terkait kemiskinan.

Pengelolaan proyek tersebut dilakukan berbasis *blue economy* karena menggunakan beberapa prinsip dasar yang mengutamakan efisiensi, keberlanjutan, *zero waste* dan inklusifitas. Hal tersebut berjalan beriringan dengan pilar pembangunan Indonesia, yaitu *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*. Adapun program pembangunan kerja sama antara KKP dan FAO pada proyek tersebut telah berjalan dengan baik, tetapi memerlukan koordinasi yang baik antar seluruh *stakeholder*, walaupun masih banyak kendala yang perlu menjadi perhatian dan

pengelolaan yang belum maksimal. Namun, secara keseluruhan, kerja sama FAO dan KKP dalam proyek UPI membawa hasil positif dengan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

REFERENSI

- Antara News. (2012, December 12). *KKP Upayakan Kurangi Kemiskinan Lewat Blue Economy*. <https://www.antaraneews.com/berita/348192/kkp-upayakan-kurangi-kemiskinan-lewat-blue-economy>
- ANZDOC. (2013). *Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kolaborasi Kelautan dan Perikanan* [Dokumen]. <https://adoc.tips/download/memorandum-saling-pengertian-antara-kementerian-kelautan-dan.html>
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen. (2018). *Rekomendasi Panja Kerjasama Ekonomi Regional*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Conservation International. (2011, June 14). *Laporan Investigasi Dampak Lingkungan Akuakultur, Budidaya Pangan Hasil Laut Berkelanjutan Menjadi Kunci Ketahanan Pangan Global Masa Depan*. <https://www.conservation.org/NewsRoom/pressreleases/Pages/Laporan-Investigasi-Dampak-Lingkungan-Akuakultur.aspx>
- Dewan Kelautan Indonesia. (2012). *Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru* [Dokumen].
- Dinas Komunikasi dan Informatika KLU. (2016). *KLU dalam Data* [Dokumen].
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2019, March 6). *KKP dan FAO Jalankan Program Pengelolaan Perikanan Terintegrasi di Indonesia*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. <https://kkp.go.id/djpt/artikel/9242-kkp-dan-fao-jalankan-program-pengelolaan-perikanan-terintegrasi-di-indonesia>
- FAO of the UN. (2017). *Blue Growth Initiative*.
- Field Facilitator of FAO Indonesia. (2019). *Pengembangan Produk, Uji Coba Penjualan dan Penguatan Kelompok*.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (n.d.). *About FAO*. <http://www.fao.org/about/en/>
- Hartomo, G. (2019, June 29). *KKP dan FAO luncurkan UPI Pindang Higienis di Lombok Utara*. Okezone. <https://economy.okezone.com/read/2019/06/29/320/2072617/kkp-dan-fao-luncurkan-upi-pindang-higienis-di-lombok-utara>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2010). *Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Angka* [Document].
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2017). *Rencana Strategis 2015-2019*. [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN/Renstra dan Renja KKP/RENSTRA Peraturan Menteri 63 FINAL \(5\).pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN/Renstra%20dan%20Renja%20KKP/RENSTRA%20Peraturan%20Menteri%2063%20FINAL%20(5).pdf)
- Lestari, M. M. (2009). *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 dan Studi Kasus)*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Penerbit Margaretha Pustaka.
- Mira, Firdaus, M., & Reswat, E. (2014). Penerapan Prinsip Blue Economy pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Buletin Riset Sosek*

- Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 17–23.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/marina.v9i1.213>
- Nurhayati, S. (2013). Blue and Green Economy (BGE) Policy and Their Impact to Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 37–42.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v12i2.183>
- Pasaribu, A. M. (2017). *Konsep Blue Economy: Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia*. Ekuilibria.
- Patil, P. G., Viridin, J., Diez, S. M., Roberts, J., & Singh, A. (2016). *Toward the Blue Economy: A Promise for Sustainable Growth in the Caribbean; An Overvie*.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25061>
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy*. Paradigm Publications.
- Radiarta, I. N., Erlania, E., & Haryadi, J. (2015). Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(1), 47–59.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1247>
- Rakhmindyarto, & Sinulingga, W. F. (n.d.). *Ekonomi Biru untuk Maritim Indonesia yang Berkelanjutan*. Kementrian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/4451/ekonomi-biru-maritim-indonesia-berkelanjutan.pdf>
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1914–1928.
<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/3189>
- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. YPOI.
- Smulders, M. (2016, March 15). *A New Landscape for Indonesian Food Security*. Forbes Indonesia. <http://forbesindonesia.com/berita-1025-a-new-landscape-forindonesian-food-security.html>
- Suhaim, S. (2019). *Capaian dan Hasil dari Proyek*. FAO Indonesia.
- Suranava, G. (2016). *Teknologi Pemindangan Ikan Tongkol*. Warmadewa University Press.